



Dinas Komunikasi
Informatika,
Persandian dan
Statistik

Rencana Strategis
(RENSTRA) 2025-2029

Alamat : Jl. Akasia No.02 Tembilahan

Email : diskominfops@inhilkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Dalam penyusunannya, RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2029 disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah serta segenap elemen lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan dukungan, masukan, dan kritik yang konstruktif agar dapat diimplementasikan secara optimal dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Tembilahan, September 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir



Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH
NIP. 19820701 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	19
1. Tujuan dan Sasaran	19
2. Strategi dan Arah Kebijakan	22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	25
1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan.....	25
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	62
BAB V PENUTUP	65
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	2
Gambar 1.2 Hubungan Renstra OPD, RPJMD Provinsi, Renstra Kementerian dan Renja OPD	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	9
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD.....	19
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	19
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia Tahun 2024.....	9
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Tahun 2024	10
Tabel 2.3 Sumber Daya Keuangan Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2.5 Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel 2.6 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	18
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025–2030	21
Tabel 3.2 Strategi Rencana Strategis.....	22
Tabel 3.3 Penahapan Rencana Strategis.....	22
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis	24
Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan.....	27
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	43
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	61
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	64
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 2025-2029 memiliki urgensi yang sangat tinggi. Dokumen ini bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di era digital. Renstra ini disusun berdasarkan dua pilar utama yaitu Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Renstra perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhil Tahun 2025-2029. Dengan diterbitkannya Perda RPJMD tersebut, arah pembangunan Kabupaten Inhil untuk lima tahun ke depan telah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik harus selaras dan terintegrasi penuh dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Saat ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang terhubung dan berbasis data. Kondisi yang ada meliputi :

- Ketidaksetaraan infrastruktur TIK di wilayah perkotaan dan perdesaan, khususnya di daerah kepulauan
- Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital masyarakat
- Kerentanan keamanan siber yang menuntut penguatan sistem persandian
- Keterbatasan data sektoral yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Diterbitkannya Perda RPJMD 2025-2029 menjadi momentum strategis untuk menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik memiliki peran sentral sebagai motor penggerak dalam membangun Pemerintahan Digital, memperluas cakupan layanan internet, serta memastikan data statistik daerah dapat diakses dengan akurat dan mudah

Penyusunan Renstra ini adalah wujud komitmen Diskominfo Pers Kabupaten Inhil untuk :

- Mendukung visi kepala daerah dengan mengimplementasikan program-program yang sejalan dengan RPJMD
- Mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan transparan melalui digitalisasi
- Mengoptimalkan potensi TIK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan demikian, Renstra ini bukan sekadar dokumen administrasi. Ia adalah kompas strategis yang akan memandu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik untuk

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tapahan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
24. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian;
27. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
36. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir;
37. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan yang jelas, terarah, dan saling berkaitan. Dokumen ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk mengarahkan seluruh kegiatan dan sumber daya agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

a. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud utama dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan dan menerjemahkan visi, misi, dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Dokumen ini menjadi jembatan antara kebijakan makro pemerintah daerah dengan implementasi teknis di lapangan. Selain itu, Renstra ini juga bermaksud untuk:

- Menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terukur bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program dan kegiatan.
- Mengoptimalkan alokasi sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun teknologi, agar tepat sasaran dan efisien.

b. Tujuan Penyusunan Renstra

Secara lebih rinci, tujuan penyusunan Renstra Diskominfo Pers Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Menjadikan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sebagai motor penggerak utama dalam membangun ekosistem digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuannya adalah menciptakan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- Memastikan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir tentang kebijakan dan program pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik dan mengurangi kesenjangan informasi.
- Membangun sistem keamanan siber yang tangguh untuk melindungi data dan informasi strategis pemerintah daerah dari berbagai ancaman digital. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pemerintahan yang aman dan terpercaya.
- Mengembangkan sistem pengelolaan data statistik yang andal sebagai dasar utama bagi perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti di seluruh perangkat daerah.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Tujuannya adalah agar ASN dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjadi agen perubahan digital.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

3.4 Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

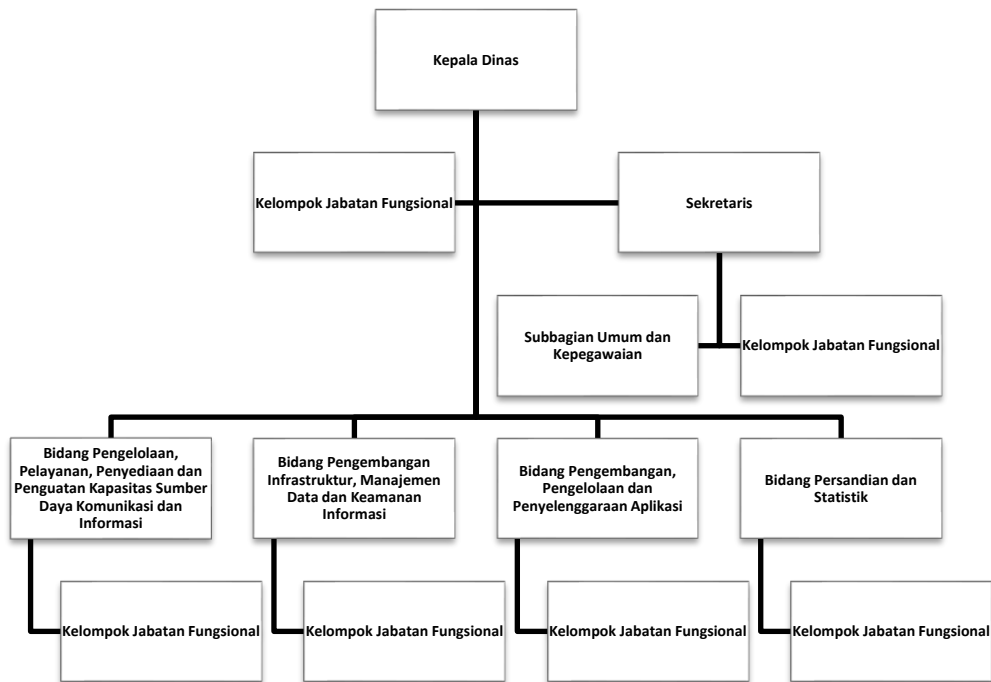
- a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan tatakelola Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Bidang Aplikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Kelompok JF.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik didukung oleh 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 97 Tenaga Kontrak/Honorar dengan rincian kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	SDM/Jabatan	Jumlah Per Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Tertinggi	Jumlah Per Satuan Pendidikan	Keterangan
1.	PNS (Pegawai Negeri Sipil)				
	a.		S1		
			S2		
		1	S3	1	
	b.	2	S1	2	
		2	S2	2	
			S3		
	c.		S1		
			S2		
			S3		
	d.	8	S1	8	
		2	S2	2	

No	SDM/Jabatan		Jumlah Per Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Tertinggi	Jumlah Per Satuan Pendidikan	Keterangan
				S3		
				D3	1	
	e.	Staf /Pelaksana	6	S1	6	
				S2		
				S3		
			2	SLTA	2	
2.	PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)		1	S1	1	
				S2		
				S3		
3.	Tenaga Kontrak/Honorer		97	S1	54	
				S2	2	
				S3		
				D3	2	
				SLTA	38	

Sumber: Data olahan Subbagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik meliputi:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Jenis Sarana/Prasarana		Satuan	Jumlah/ Luas/ Kapasitas	Kondisi	Keterangan
1.	Aset Tidak Bergerak					
	a.	Gedung Kantor Permanen	Unit	1		
	b.	Gedung Media Center	Unit	1		
	c.	Gedung Lainnya	Unit	1		
	d.	Sumur Bor	Meter	1		
2.	Aset Bergerak (Sarana & Prasarana Penunjang)					
	a.	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	3		
	b.	Kendaraan Khusus	Unit	1		
	c.	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	9		
	d.	Komputer/Laptop	Unit	105		
	e.	Printer & Scanner	Unit	36		
		Hard Disk	Unit	15		
		Perkakas Bengkel Listrik	Unit	2		
		Capture Card	Unit	1		
		Alat Ukur Universal	Unit	2		
		Alat Ukur/Pembanding	Unit	2		
		Alat Ukur Lainnya	Unit	1		

	Lemari Besi/Metal	Unit	7			
	Rak Besi	Unit	3			
	Filing Cabinet Besi	Unit	23			
	Brandkas	Unit	1			
	Lemari Kaca	Unit	5			
	Alat Penghancur Kertas	Unit	2			
	Television Control Operasional Lift	Unit	12			
	Papan Tulis	Unit	1			
	Mesin Pompa Air	Unit	1			
	Lampu Hias	Unit	2			
	Alat Kantor Lainnya	Meter	1			
	Meja Kerja Kayu	Unit	6			
	Meja Resepsionis	Unit	1			
	Meja Panjang	Unit	1			
	Meja Bundar	Unit	1			
	Kursi Tamu	Unit	1			
	Kursi Putar	Unit	12			
	Sofa	Unit	2			
	A.C. Window	Unit	4			
	A.C. Split	Unit	32			
	Kipas Angin	Unit	7			
	Mixer	Unit	1			
	Radio	Unit	2			
	Televisi	Unit	28			
	Loudspeaker	Unit	1			
	Sound System	Unit	1			
	Wireless	Unit	5			
	Microphone	Unit	1			
	Microphone Floor Stand	Unit	1			
	Microphone Table Stand	Unit	3			
	Camera Video	Unit	3			
	Camera Film	Unit	1			
	Dispenser	Unit	1			
	Handy Cam	Unit	1			
	Bracket Standing Peralatan	Unit	1			
	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	2			
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2			
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	5			
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	15			
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	50			
	Meja Rapat Pejabat	Unit	2			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	3			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	10			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	25			
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	40			
	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	2			

	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Unit	5			
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	6			
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	3			
	Set Studio Light Signal	Unit	2			
	Microphone/Wireless MIC	Unit	14			
	Professional Sound System	Unit	1			
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	6			
	Cable	Unit	6			
	Proyektor + Attachment	Unit	4			
	Headphone	Unit	6			
	Camera+ Attachmen	Unit	7			
	CCTV	Unit	2			
	Peralatan Studio Audio Lain-lain	Unit	16			
	Camera Electronic	Unit	2			
	Video Monitor	Unit	5			
	Video Tape Recorder Portable	Unit	1			
	Video Switcher	Unit	1			
	Tripod Camera	Unit	8			
	Lensa Kamera	Unit	3			
	Camera View Finder	Unit	4			
	Mixer PVC	Unit	2			
	Layar Film/Projector	Unit	2			
	Camera Under Water	Unit	2			
	Camera Digital	Unit	3			
	Kamera Stile	Unit	1			
	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	Unit	1			
	Kamera Udara	Unit	2			
	Alat Pengolah Data Studio	Unit	1			
	Alat Studio Lain-lain	Unit	1			
	Telephone Mobile	Unit	4			
	Handy Talky (HT)	Unit	5			
	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Unit	2			
	Peralatan Pemancar VHF/FM Lain-Lain	Unit	1			
	Unit Pemancar UHF Stationary	Unit	1			
	Peralatan Pemancar UHF Lain-Lain	Unit	1			
	Peralatan Pemancar SHF Lain-Lain	Unit	1			
	Peralatan Antena UHF Lain-Lain	Unit	2			
	Antene SHF Portable	Unit	1			
	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-Lain	Unit	1			
	Concrete Tower	Unit	1			
	Switcher/Menara Antena Lain-Lain	Unit	1			
	Stabilizer	Unit	1			
	Local Area Network (LAN)	Unit	1			
	Server	Unit	10			
	Router	Unit	14			
	Hub	Unit	6			

	Rak Server	Unit	1			
	Wireless Access Point	Unit	17			
	Switch	Unit	3			
	Acces Point	Unit	20			
	Peralatan Jaringan Lain-Lain	Unit	120			
	Software	Paket	2			
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aplikasi	1			

Sumber: KIB Aset Dinas Kominfo Per Desember 2024

c. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Sumber anggaran utama berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Realisasi anggaran dan capaian kinerja keuangan periode sebelumnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan anggaran untuk periode 2025-2029.

Tabel 2.3
Sumber Daya Keuangan Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
1.	2020	APBD	14.626.435.000	13.922.813.706	95.18	
2.	2021	APBD	15.759.534.157	14.875.456.282	94.39	
3.	2022	APBD	16.460.490.164	15.660.160.940	95.13	
4.	2023	APBD	23.461.174.508	21.984.847.959	93.70	
5.	2024	APBD	26.712.038.938	23.299.400.548	87.22	

Sumber: LKjIP 2020-2024 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik selama tahun 2020–2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Target	Target IKK	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91.28		0	80	97	97	0	0	97	94.75	95.55	91.28
2	Indeks pemerintahan digital/SPBE	2.54		0	2.5	3	3.2	0	0	2.9	2.13	2.23	2.54
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.32		0	0	0	0	0	0	0	0	1.60	2.32
4	Indeks Keamanan Informasi	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
5	Nilai AKIP	71.50		-	B	62	70	BB	59.14	64.04	73.65	71.05	71.50
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		30	-	-	-	-	3	0	12.5	12.5	27.27	30
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		66.6	-	-	-	-	54	8.82	8.82	8.82	66.6	66.6
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		65.78	-	-	-	-	685.663	70	70	70	70	65.78
9	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		30	-	-	-	-	34	0	10	15	20	30
10	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		30	-	-	-	-	34	0	10	15	20	30
11	Tingkat keamanan informasi pemerintah		39	-	-	-	-	645	0	0	0	0	39

Sumber : Diskominfops 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sangat beragam, mencakup internal pemerintahan maupun eksternal (masyarakat luas). Berdasarkan mandat dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, kelompok sasaran utamanya dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Kelompok Sasaran Internal Pemerintah Daerah

Kelompok sasaran ini adalah unit-unit kerja atau individu di dalam struktur pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi pengguna utama layanan infrastruktur, sistem informasi, dan keamanan data yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. Pelayanan kepada kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

- Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
- Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Inhil)
- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

b) Kelompok Sasaran Eksternal Pemerintah Daerah

Kelompok sasaran ini adalah individu, kelompok, atau entitas di luar struktur pemerintahan yang menjadi penerima manfaat langsung dari pelayanan informasi publik, statistik, serta berbagai inisiatif digital yang digagas oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

- Masyarakat Umum Kabupaten Indragiri Hilir
- Pelaku Usaha (UMKM, Korporasi) di Kabupaten Indragiri Hilir
- Media Massa (Cetak, Elektronik, Online) dan Jurnalis
- Akademisi/Peneliti dan Mahasiswa
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Komunitas

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD

Dalam penyelenggaraan pelayanan selama periode sebelumnya (2020-2024) serta proyeksi kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2029. Identifikasi permasalahan ini krusial sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan, dan program pada Renstra 2025-2029 agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi akar masalah yang ada. Analisis permasalahan ini merujuk pada evaluasi kinerja masa lalu, kondisi saat ini, kondisi ideal yang diharapkan, akar masalah yang melatarbelakangi, serta potensi dampak negatif jika permasalahan tersebut tidak diatasi. Tabel 2.5 merangkum perumusan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Kondisi Saat Ini (2024)	Kondisi Ideal (2029)	Akar Masalah	Dampak Jika Tidak Diatasi
1	Belum optimalnya integrasi sistem informasi dan digitalisasi layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah	Pada tahun 2024 indeks SPBE kabupaten indragiri hilir berada pada angka 2.54, pencapaian ini masih dalam kategori “cukup”, implementasi SPBE kabupaten indragiri hilir belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian indikator SPBE	optimalnya integrasi sistem informasi dan digitalisasi layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Regulasi Turunan atau SOP yang Mengikat untuk Interoperabilitas • Lemahnya Koordinasi Antar OPD dalam Pengembangan Sistem • Tata Kelola Data yang Belum Matang • Infrastruktur TIK yang Belum Memadai • Kurangnya Pemanfaatan Platform Berbagi Pakai • Keterbatasan SDM TIK yang Kompeten 	Tidak optimalnya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas
2	Belum maksimalnya data sektoral yang tersedia, Rendahnya kualitas dan kurangnya pemanfaatan data statistik sektoral melalui portal inhil satu data mereka (ISTAKA) untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan pembangunan daerah	Hasil evaluasi Indeks pembangunan statistik sektoral kabupaten indragiri hilir ditahun 2024 dengan nilai 2.32 predikat “cukup”	maksimalnya data sektoral yang berkualitas sesuai dengan prinsip SDI dan telah menyepakati pemanfaatan data melalui portal inhil satu data mereka (ISTAKA) untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan pembangunan indragiri hilir yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesiapan infrastruktur data • Kurangnya SDM penyelenggara satu data • Masih kurangnya varian data sektoral yang tersedia • Data yang dihasilkan belum sesuai prinsip-prinsip SDI (Satu Data Indonesia) • Lemahnya dukungan OPD 	Rendahnya kualitas data statistik sektoral kabupaten indragiri hilir dan belum bisa mewujudkan pembangunan yang lebih baik

				dalam pengembangan data statistik sektoral	
3	Belum maksimalnya layanan Informasi Publik dan Pengelolaan isu strategis serta kemitraan media	<ul style="list-style-type: none"> Sampai tahun 2024 nilai keterbukaan informasi publik kabupaten indragiri hilir hanya berada pada kategori menuju “informatif”, belum mampu mencapai kondisi “sangat informatif” Masih rendahnya pengelolaan isu strategis serta kemitraan media sehingga masih ada isu isu negatif 	Terwujudnya keterbukaan informasi publik kabupaten indragiri hilir pada kondisi sangat informatif dan optimalnya pengelolaan isu strategis serta kemitraan media	<ul style="list-style-type: none"> Sarana pelayanan dan SDM pengelola informasi publik telah tersedia tetapi belum sesuai standar Kurangnya sarana dan prasarana publikasi 	Tidak maksimalnya layanan Informasi Publik dan maraknya isu negatif serta kurang baiknya hubungan dengan unsur/pihak media

2.2.2 Isu Strategis PD

Perumusan isu strategis ini dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, permasalahan pelayanan yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta lingkungan dinamis global, nasional, dan regional yang relevan.

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

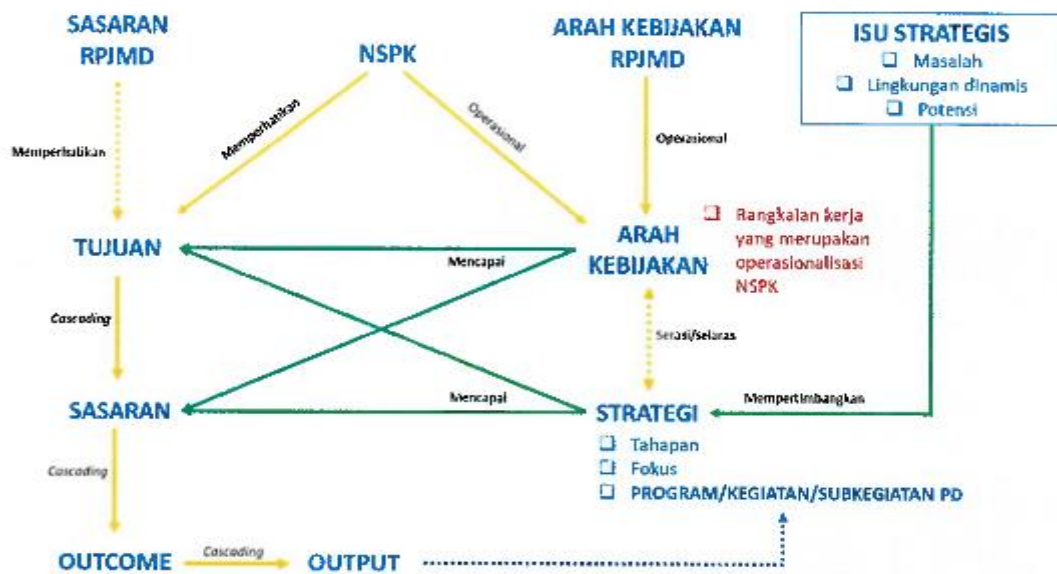
Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> - Transformasi Digital dan Pemerintahan Digital (SPBE) - Infrastruktur TIK dan Konektivitas - Keamanan Informasi dan Siber - Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang TIK 	<ul style="list-style-type: none"> -Belum optimalnya pelaksanaan SPBE -Belum tersedianya jaringan intra pemerintah -Belum tersedianya perangkat dan SDM persandian -Belum optimalnya Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi -Masih kurangnya pelatihan dan sertifikasi di bidang TIK, keamanan siber, data analytics, dan komunikasi digital 		<ul style="list-style-type: none"> - Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0 -Keamanan Siber dan Perlindungan Data -Disinformasi dan Hoaks -Peran Media Sosial dalam Komunikasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Digital (E-Government) - Literasi Digital dan Inklusi Digital - Ekosistem Ekonomi Digital - Regulasi dan Kebijakan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Konektivitas dan Kesenjangan Digital Antarwilayah - Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital - Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Publik - Inovasi Layanan Publik Berbasis TIK - Peran Kominfops dalam Branding Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Implementasi SPBE - Peningkatan Kualitas Layanan Digital - Literasi Digital Masyarakat - Pemerataan Akses Internet - Pengembangan Jaringan Pemerintah - Pemanfaatan Teknologi Baru - Penguatan Keamanan Data dan Sistem - Manajemen Risiko Keamanan Informasi - Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber - Pemanfaatan Berbagai Kanal Komunikasi - Penanggulangan Hoaks dan Disinformasi - Penguatan Keterlibatan Publik - Peningkatan Kompetensi ASN - Manajemen Pengetahuan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

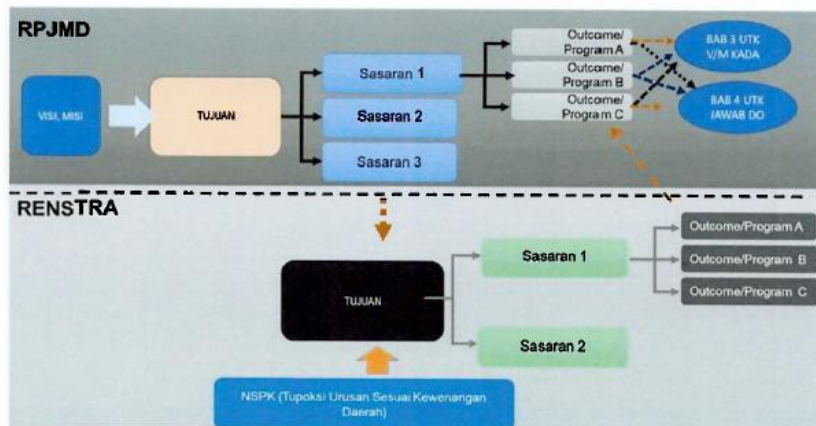
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029 harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 dengan menetapkan indikator kinerja sasaran yang realistis mampu menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peluang dan potensi yang dimiliki sehingga semua permasalahan dan isu strategis dapat diselesaikan dengan baik.

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : Inmendagri nomor 2 Tahun 2025

3.1.1 Tujuan Renstra

Tujuan strategis adalah hasil akhir yang bersifat ideal dan menjadi acuan bagi seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki satu tujuan utama, yaitu:

“Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi”

Tujuan ini mencerminkan peran sentral Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dalam transformasi digital, yang mencakup tiga pilar utama:

- Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemda dan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
- Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sisten Statistik Sektor Nasional (SSN)
- Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemda

3.1.2 Sasaran Renstra

Sasaran strategis adalah target spesifik, terukur, dan realistis yang harus dicapai untuk merealisasikan tujuan strategis. Pencapaian setiap sasaran akan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Untuk mencapai tujuan di atas, Diskominfo Pers Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan empat sasaran strategis, yaitu:

- Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, dengan indikator Indeks pemerintahan digital (PEMDI) dan Indeks keterbukaan informasi publik (KIP)
- Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, dengan indikator Indeks pembangunan statistik (IPS)
- Meningkatnya keamanan informasi, dengan indikator Indeks keamanan informasi (KAMI)
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kominfops, dengan indikator Nilai AKIP

Perumusan Tujuan, Sasaran, indikator beserta target Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi		Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks)	-	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	2.54	2.8	3	3.3	3.6	3.8	4	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	91.28	92	93	94	95	96	97	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.32	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	19	21	23	27	30	32	35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kominfops	Nilai AKIP (Nilai)	71.5 (BB)	71.6 (BB)	71.7 (BB)	71.8 (BB)	71.9 (BB)	72 (BB)	72.1 (BB)	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik merumuskan strategi yang terukur dan arah kebijakan yang terfokus. Strategi ini merupakan pendekatan operasional menyeluruh yang akan memandu setiap langkah, sementara arah kebijakan akan menjadi panduan normatif dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berlandaskan pada prinsip inovasi berkelanjutan, kolaborasi adaptif, dan tata kelola yang akuntabel.

3.2.1 Strategi Rencana Strategis

Pada bagian ini menguraikan strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini merupakan langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Untuk mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik akan fokus pada empat strategi utama yaitu:

Tabel 3.2
Strategi Rencana Strategis

Strategi RPJMD	Strategi Renstra
Mendorong penerapan SPBE untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan infrastruktur TIK dan jaringan interoperabilitas SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan integrasi dan interoperabilitas aplikasi SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM dan tatakelola SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keamanan informasi dan keberlanjutan SPBE

Selanjutnya setelah merumuskan strategi, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik memiliki tahapan, ahapan ini disusun secara sistematis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan selama periode 2025-2029. Pelaksanaan Renstra ini akan dibagi menjadi lima tahap, masing-masing dengan fokus yang berbeda, dan disusun dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Rencana Strategis

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2023)
Penguatan Kebijakan SPBE di	Penerapan tata kelola SPBE di	Peningkatan Manajemen SPBE	Interoperabilitas Layanan SPBE di	Optimalnya penerapan SPBE

kabupaten indragiri hilir	kabupaten indragiri hilir	di kabupaten indragiri hilir	kabupaten indragiri hilir	di kabupaten indragiri hilir
Fokus utama : Penyempurnaan regulasi	Fokus Utama : Perluasan Implementasi Tata Kelola SPBE	Fokus Utama : Pengembangan Manajemen SPBE	Fokus Utama : Penguatan Layanan SPBE	Fokus Utama : Peningkatan kualitas Layanan Publik yang berkelanjutan dan adaptif
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan regulasi tata Kelola • Melengkapi regulasi Pendukung • Penguatan kebijakan internal tata kelola SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan arsitektur dan peta rencana SPBE • Pengembangan inovasi proses bisnis SPBE • Peningkatan layanan pusat data • Peningkatan layanan jaringan intra pemerintah • Peningkatan sistem penghubungan layanan pemerintah • Penguatan peran koordinatif tim koordinasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan manajemen risiko SPBE • Pengembangan manajemen keamanan informasi • Pengembangan manajemen data • Pengembangan manajemen aset TIK • Pengembangan koptensi SDM • Pengembangan Manajemen pengetahuan • Pengembangan manajemen perubahan • Pengembangan manajemen layanan SPBE • Pengembangan pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik • Integrasi layanan publik berbasis elektronik • Penyediaan aplikasi layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penerapan SPBE di kabupaten indragiri hilir yang berkelanjutan

3.2.2 Arah Kebijakan Rencana Strategis

Arah Kebijakan Perangkat Daerah adalah rangkaian pedoman atau prinsip-prinsip kerja yang lebih operasional yang akan menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai jembatan antara strategi yang bersifat lebih umum dengan

tindakan konkret (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Perumusan penahapan pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik disusun dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Rencana Strategis

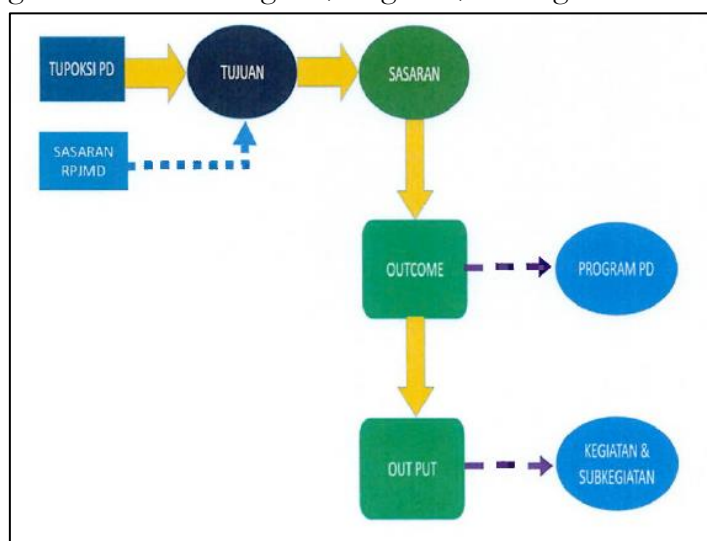
Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintahan dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) diseluruh instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pusat data
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan internet untuk mendukung SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan arsitektur SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengelolaan portal pelayanan publik terpadu
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP)
	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi data dan metadata
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aplikasi umum SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi SDM SPBE diseluruh OPD
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tim koordinasi dan pengelola SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan regulasi dan pedoman SPBE daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan monitoring berkala penerapan SPBE
	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim tanggap insiden siber (CSIRT) daerah 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan edukasi keamanan siber 	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses sistematis yang menghubungkan kondisi eksisting dengan target capaian masa depan. Untuk memastikan perencanaan yang logis, terarah, dan berbasis pada kebutuhan nyata, terdapat alur pikir dan kaidah perumusan permasalahan yang menjadi fondasi utama sebagai berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Inmendagri nomor 2 Tahun 2025

Diagram ini menggambarkan benang merah yang sangat krusial dalam penyusunan Renstra PD, dimulai dari dasar pembentukan PD hingga operasionalisasi di lapangan :

- **Tupoksi Perangkat Daerah (PD):** Segala sesuatu bermula dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi mandat Perangkat Daerah. Ini adalah alasan keberadaan PD dan lingkup kewenangannya.
- **Sasaran RPJMD:** Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Sasaran RPJMD. Tujuan Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan Sasaran RPJMD ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjukkan kontribusi PD terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.
- **Tujuan Perangkat Daerah:** Tupoksi PD dan Sasaran RPJMD menjadi dasar perumusan Tujuan Perangkat Daerah. Tujuan ini adalah hasil akhir jangka menengah yang ingin dicapai oleh PD.
- **Sasaran Perangkat Daerah:** Tujuan PD kemudian diturunkan menjadi Sasaran Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini akan menjadi target-target antara yang harus dicapai untuk mewujudkan Tujuan.

- Outcome & Program PD: Pencapaian Sasaran PD akan menghasilkan berbagai outcome. Outcome ini kemudian diwujudkan melalui Program-program PD. Ini menunjukkan bahwa Program PD bukan sekadar daftar kegiatan, tetapi berorientasi pada hasil yang lebih tinggi.
- Output & Kegiatan & Subkegiatan: Program PD kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi Kegiatan dan Subkegiatan. Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan ini diharapkan akan menghasilkan output yang konkret, yang secara kumulatif akan berkontribusi pada outcome dan akhirnya mencapai Sasaran dan Tujuan.

Berdasarkan Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD diatas, berikut dijabarkan rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital			Indeks transformasi digital nasional (Indeks)		
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah			Indeks pemerintahan digital (Indeks)		
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		Persentase Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan		Indeks pemerintahan digital (Indeks)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			aplikasi informatika	Persentase Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di		2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Persentase Kegiatan Pengelolaan E-government di		2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Kominfo (Dokumen) 2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)		
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang	2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatnya keamanan informasi			Indeks Keamanan Informasi (Indeks)		
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
					Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Persentase Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola	2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
					hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kominfops	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP (Nilai)			
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Perangkat Daerah (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)		2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase administrasi kepegawaian yang		2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran		2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Penggandaan yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor		2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik		2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.1.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Pada bagian ini, diuraikan secara rinci rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik untuk periode 2026-2030. Setiap Sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta estimasi pagu indikatif pendanaan, yang kesemuanya merupakan implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.341.0 17.000		11.058.8 16.000		11.085.1 95.000		11.122.4 25.000		11.160.8 30.000		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.820.26 0.000		6.224.26 1.000		6.239.10 8.000		6.260.06 2.000		6.281.67 7.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	59	100	5.820.26 0.000	100	6.224.26 1.000	100	6.239.10 8.000	100	6.260.06 2.000	100	6.281.67 7.000	2.16.2.20.2.21.01.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	69	100	63.335.0 00	100	113.835. 132	100	115.691. 014	100	118.310. 264	100	121.012. 146		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.000.0 00		60.000.0 00		62.000.0 00		63.000.0 00		64.000.0 00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	35.000.0 00	2	60.000.0 00	2	62.000.0 00	2	63.000.0 00	2	64.000.0 00		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.0 00		45.000.0 00		45.000.0 00		48.000.0 00		49.000.0 00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	20.000.0 00	4	45.000.0 00	4	45.000.0 00	4	48.000.0 00	4	49.000.0 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.335.00 0		3.835.13 2		3.691.01 4		3.310.26 4		3.012.14 6		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	3.335.00 0	2	3.835.13 2	2	3.691.01 4	2	3.310.26 4	2	3.012.14 6		
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.00 0		3.000.00 0		3.000.00 0		3.000.00 0		3.000.00 0		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	3.000.00 0	1	3.000.00 0	1	3.000.00 0	1	3.000.00 0	1	3.000.00 0		
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.000.00 0		2.000.00 0		2.000.00 0		2.000.00 0		2.000.00 0		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	114	2.000.00 0	114	2.000.00 0	114	2.000.00 0	114	2.000.00 0	114	2.000.00 0		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	63	100	4.668.68 8.000	100	4.719.18 8.124	100	4.721.04 3.998	100	4.723.66 3.248	100	4.726.36 5.122		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.665.36 3.000		4.690.61 3.062		4.691.54 0.999		4.692.85 0.624		4.694.20 1.561		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	40	4.665.36 3.000	40	4.690.61 3.062	40	4.691.54 0.999	40	4.692.85 0.624	40	4.694.20 1.561		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.325.00 0		28.575.0 62		29.502.9 99		30.812.6 24		32.163.5 61		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.325.00 0	1	28.575.0 62	1	29.502.9 99	1	30.812.6 24	1	32.163.5 61		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	50	100	29.715.0 00	100	80.215.1 24	100	82.070.9 98	100	84.690.2 48	100	87.392.1 22		
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				9.905.00 0		35.155.0 62		36.082.9 99		37.392.6 24		38.743.5 61		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	9.905.00 0	1	35.155.0 62	1	36.082.9 99	1	37.392.6 24	1	38.743.5 61		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				19.810.0 00		45.060.0 62		45.987.9 99		47.297.6 24		48.648.5 61		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	19.810.0 00	5	45.060.0 62	5	45.987.9 99	5	47.297.6 24	5	48.648.5 61		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	88	100	292.200. 000	100	418.450. 310	100	423.089. 995	100	428.638. 120	100	436.392. 805		
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.0 00		10.000.0 00		10.000.0 00		10.000.0 00		10.000.0 00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			103.907.000		129.157.062		130.084.999		131.394.624		132.745.561			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	103.907.000	2	129.157.062	2	130.084.999	2	131.394.624	2	132.745.561		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.715.000		54.965.062		55.892.999		57.202.624		58.553.561			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	29.715.000	2	54.965.062	2	55.892.999	2	57.202.624	2	58.553.561		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			19.810.000		45.060.062		45.987.999		47.297.624		48.648.561			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	19.810.000	1	45.060.062	1	45.987.999	1	47.297.624	1	48.648.561		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.905.000		35.155.062		36.082.999		37.392.624		38.743.561			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	250	25	9.905.000	25	35.155.062	25	36.082.999	25	37.392.624	25	38.743.561		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			108.863.000		134.113.062		135.040.999		135.350.624		137.701.561			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	108.863.000	12	134.113.062	12	135.040.999	12	135.350.624	12	137.701.561		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100	100	597.462.000	100	647.962.124	100	649.817.998	100	652.437.248	100	655.139.122		
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.431.000		84.681.062		85.608.999		86.918.624		88.269.561		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12	59.431.000	12	84.681.062	12	85.608.999	12	86.918.624	12	88.269.561		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				533.031.000		558.281.062		559.208.999		560.518.624		561.869.561		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	533.031.000	12	558.281.062	12	559.208.999	12	560.518.624	12	561.869.561		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	yang Disediakan (Laporan)													
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	100	100	118.860.000	100	194.610.186	100	197.393.997	100	201.322.872	100	205.375.683		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.715.000		54.965.062		55.892.999		57.202.624		58.553.561		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	29.715.000	3	54.965.062	3	55.892.999	3	57.202.624	3	58.553.561		
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.620.000		64.870.062		65.797.999		67.107.624		68.458.561		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	39.620.000	1	64.870.062	1	65.797.999	1	67.107.624	1	68.458.561		
2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.525.000		74.775.062		75.702.999		77.012.624		78.363.561		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	49.525.000	4	74.775.062	4	75.702.999	4	77.012.624	4	78.363.561		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.985.45 0.000		3.192.67 8.000		3.200.29 4.000		3.211.04 2.000		3.222.13 0.000		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	91.28	93	2.985.45 0.000	94	3.192.67 8.000	95	3.200.29 4.000	96	3.211.04 2.000	97	3.222.13 0.000	2.16.2.20.2.21.01.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	49	100	2.985.45 0.000	100	3.192.67 8.000	100	3.200.29 4.000	100	3.211.04 2.000	100	3.222.13 0.000		
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				2.000.00 0.000		2.018.83 8.910		2.019.53 1.280		2.020.50 8.370		2.021.51 6.370		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	1	2.000.00 0.000	1	2.018.83 8.910	1	2.019.53 1.280	1	2.020.50 8.370	1	2.021.51 6.370		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				120.000. 000		138.838. 909		139.531. 272		140.508. 372		141.516. 372		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	20	120.000. 000	20	138.838. 909	20	139.531. 272	20	140.508. 372	20	141.516. 372		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				360.450.000		379.288.909		379.981.272		380.958.362		381.966.362		
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1	360.450.000	1	379.288.909	1	379.981.272	1	380.958.362	1	381.966.362		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				80.000.000		98.838.909		99.531.272		100.508.362		101.516.362		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1	30	80.000.000	30	98.838.909	30	99.531.272	30	100.508.362	30	101.516.362		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				10.000.000		28.838.909		29.531.272		30.508.362		31.516.362		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	100	10.000.000	100	28.838.909	100	29.531.272	100	30.508.362	100	31.516.362		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				10.000.000		28.838.909		29.531.272		30.508.362		31.516.362		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang	0	1	10.000.000	1	28.838.909	1	29.531.272	1	30.508.362	1	31.516.362		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)													
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				60.000.000		78.838.909		79.531.272		80.508.362		81.516.362		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	100	60.000.000	100	78.838.909	100	79.531.272	100	80.508.362	100	81.516.362		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				100.000.000		118.838.909		119.531.272		120.508.362		121.516.362		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2	2	100.000.000	2	118.838.909	2	119.531.272	2	120.508.362	2	121.516.362		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				5.000.000		23.838.909		24.531.272		25.508.362		26.516.362		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	23.838.909	1	24.531.272	1	25.508.362	1	26.516.362		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				200.000.000		218.838.909		219.531.272		220.508.362		221.516.362		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	7	5	200.000.000	5	218.838.909	5	219.531.272	5	220.508.362	5	221.516.362		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				40.000.000		58.838.909		59.531.272		60.508.362		61.516.362		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	3	40.000.000	3	58.838.909	3	59.531.272	3	60.508.362	3	61.516.362		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.535.307.000		1.641.877.000		1.645.793.000		1.651.321.000		1.657.023.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks pemerintahan digital (Indeks)	2.54	3	1.535.307.000	3.3	1.641.877.000	3.6	1.645.793.000	3.8	1.651.321.000	4	1.657.023.000	2.16.2.20.2.21.01.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100	100	100.000.000	100	107.612.154	100	107.891.868	100	108.286.725	100	108.694.020		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				100.000.000		107.612.154		107.891.868		108.286.725		108.694.020		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	107.612.154	1	107.891.868	1	108.286.725	1	108.694.020		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	47	100	1.435.307.000	100	1.534.264.846	100	1.537.901.132	100	1.543.034.275	100	1.548.328.980		
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				50.000.000		57.612.142		57.891.860		58.286.717		58.694.002		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	2	50.000.000	2	57.612.142	2	57.891.860	2	58.286.717	2	58.694.002		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				80.000.000		87.612.142		87.891.856		88.286.715		88.694.000		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1	80.000.000	1	87.612.142	1	87.891.856	1	88.286.715	1	88.694.000		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				100.000.000		107.612.142		107.891.856		108.286.713		108.693.998		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	54	54	100.000.000	54	107.612.142	54	107.891.856	54	108.286.713	54	108.693.998		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				20.000.000		27.612.142		27.891.856		28.286.713		28.693.998		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	1	20.000.000	1	27.612.142	1	27.891.856	1	28.286.713	1	28.693.998		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK				30.000.000		37.612.142		37.891.856		38.286.713		38.693.998		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	37.612.142	1	37.891.856	1	38.286.713	1	38.693.998		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				100.000.000		107.612.142		107.891.856		108.286.713		108.693.998		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	1	100.000.000	1	107.612.142	1	107.891.856	1	108.286.713	1	108.693.998		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				25.307.000		32.919.142		33.198.856		33.593.713		34.000.998		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	1	25.307.000	1	32.919.142	1	33.198.856	1	33.593.713	1	34.000.998		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				100.000.000		107.612.142		107.891.856		108.286.713		108.693.998		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	3	100.000.000	3	107.612.142	3	107.891.856	3	108.286.713	3	108.693.998		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				50.000.000		57.612.142		57.891.856		58.286.713		58.693.998		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	1	50.000.000	1	57.612.142	1	57.891.856	1	58.286.713	1	58.693.998		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				500.000.000		507.612.142		507.891.856		508.286.713		508.693.998		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPID yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	54	54	500.000.000	54	507.612.142	54	507.891.856	54	508.286.713	54	508.693.998		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				200.000.000		207.612.142		207.891.856		208.286.713		208.693.998		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran	1	1	200.000.000	1	207.612.142	1	207.891.856	1	208.286.713	1	208.693.998		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
anggaran SPBE Pemerintah Daerah	SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)													
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			150.000.000		157.612.142		157.891.856		158.286.713		158.693.998			
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	157.612.142	1	157.891.856	1	158.286.713	1	158.693.998		
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			30.000.000		37.612.142		37.891.856		38.286.713		38.693.998			
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	37.612.142	1	37.891.856	1	38.286.713	1	38.693.998		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			307.060.000		328.374.000		329.157.000		330.263.000		331.403.000			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.32	2.6	307.060.000	2.7	328.374.000	2.8	329.157.000	2.9	330.263.000	3	331.403.000		
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100	100	307.060.000	100	328.374.000	100	329.157.000	100	330.263.000	100	331.403.000		
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			50.000.000		51.314.000		52.097.000		52.097.000		52.287.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	100	50.000.00	100	51.314.00	100	52.097.00	100	52.097.00	100	52.287.00		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				50.000.00		55.000.00		55.000.00		55.000.00		55.190.00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	100	50.000.00	100	55.000.00	100	55.000.00	100	55.000.00	100	55.190.00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				50.000.00		55.000.00		55.000.00		55.000.00		55.190.00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	100	50.000.00	100	55.000.00	100	55.000.00	100	55.000.00	100	55.190.00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				50.000.00		55.000.00		55.000.00		55.000.00		55.190.00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0	3	50.000.00	3	55.000.00	3	55.000.00	3	55.000.00	3	55.190.00		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				50.000.00		55.000.00		55.000.00		55.000.00		55.190.00		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	100	50.000.00	100	55.000.00	100	55.000.00	100	55.000.00	100	55.190.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				57.060.000		57.060.000		57.060.000		58.166.000		58.356.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	1	57.060.000	1	57.060.000	1	57.060.000	1	58.166.000	1	58.356.000		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				348.663.000		372.865.000		373.754.000		375.009.000		376.304.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				348.663.000		372.865.000		373.754.000		375.009.000		376.304.000		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	19	23	348.663.000	27	372.865.000	30	373.754.000	32	375.009.000	35	376.304.000		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	50	100	248.663.000	100	272.865.000	100	273.754.000	100	275.009.000	100	276.304.000		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				13.663.000		37.865.000		38.754.000		40.009.000		41.304.000		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan	0	1	13.663.000	1	37.865.000	1	38.754.000	1	40.009.000	1	41.304.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	penyelenggaraan persandian (Dokumen)													
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

4.1.2 Sub Kegiatan Prioritas

Pada bagian ini, diidentifikasi Sub kegiatan-sub kegiatan yang memiliki tingkat urgensi dan dampak strategis yang tinggi, khususnya dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029, Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dan proyek prioritas nasional KPU yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
2	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta	

			pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
3	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
4	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada subbab ini, akan disajikan kerangka pengukuran kinerja yang komprehensif untuk periode Renstra 2025-2030. Pengukuran kinerja ini sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja yang disajikan di sini merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, serta refleksi dari capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi mandat Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja ini akan terbagi menjadi dua komponen utama: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang berfokus pada hasil akhir pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang lebih menyoroti kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Kedua jenis indikator ini akan menjadi dasar bagi evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik di masa mendatang

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pmerintahan Digital	Indeks	2,54	2.8	3	3.3	3.6	3.8	4	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	91.28	92	93	94	95	96	97	
3	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2.32	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	
4	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	19	21	23	27	30	32	35	
5	Nilai AKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30	40	50	60	80	90	100	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	66.6	70	75	80	85	90	95	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	65.78	50	55	60	65	70	75	
4	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	30	35	40	45	55	60	65	
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	30	35	40	45	55	60	65	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	39	42	45	46	48	62	64	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis, serta berpedoman pada RPJMD dan NSPK yang berlaku, Renstra ini diharapkan menjadi acuan utama bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan komitmen yang kuat dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik bertekad untuk mengimplementasikan setiap elemen Renstra ini secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir



Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH
NIP. 19820701 200012 1 001

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN/ METADATA	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Rata-rata nilai tingkat kematangan pada setiap domain indeks PEMDI	2.54	2.8	3	3.3	3.6	3.8	4
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	Hasil evaluasi oleh komisi informasi provinsi riau dengan kualifikasi: a. 90-100 (Informatif) b. 80-89.9 (Menuju informatif) c. 60-79.9 (Cukup informatif) d. 40-59.9 (Kurang informatif) e. Kurang dari 39 (Tidak informatif)	91.28	92	93	94	95	96	97
3	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	Rata-rata nilai hasil penilaian IPS yaitu: a. Domain prinsip SDI b. Domain kualitas data c. Domain proses bisnis statistik d. Domain kelembagaan e. Domain statistik nasional	2.32	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
4	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	Hasil evaluasi tingkat kematangan dan kelengkapan sesuai penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dengan kategori: a. Rendah 10-15 b. Tinggi 16-34 c. Strategis 35-50	19	21	23	27	30	32	35
5	Nilai AKIP (Nilai)	Bobot tingkat kematangan setiap komponen evaluasi AKIP yaitu: a. Perencanaan kinerja b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	71.5 (BB)	71.6 (BB)	71.7 (BB)	71.8 (BB)	71.9 (BB)	72 (BB)	72.1 (BB)

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN/ METADATA	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks)	Rata-rata nilai tingkat kematangan pada setiap indikator	0	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN/ METADATA	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	67	70	75	80	85	90	95
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	100	40	50	60	80	90	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota (%)	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah Penduduk	65.78	50	55	60	65	70	75
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	30	35	40	45	55	60	65
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	30	35	40	45	55	60	65
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	39	42	45	46	48	62	64

4. Indikator Kinerja Program

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUSAN/ METADATA	BASELINE 2024	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (%)	Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan lingkup penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	59	100	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	Hasil evaluasi oleh komisi informasi provinsi riau dengan kualifikasi: a. 90-100 (Informatif) b. 80-89.9 (Menuju informatif) c. 60-79.9 (Cukup informatif) d. 40-59.9 (Kurang informatif) e. Kurang dari 39 (Tidak informatif)	91.28	92	93	94	95	96	97
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Rata-rata nilai tingkat kematangan pada setiap domain indeks PEMDI	2.54	2.8	3	3.3	3.6	3.8	4
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	Rata-rata nilai hasil penilaian IPS yaitu: a. Domain prinsip SDI b. Domain kualitas data c. Domain proses bisnis statistik d. Domain kelembagaan e. Domain statistik nasional	2.32	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks)	Hasil evaluasi tingkat kematangan dan kelengkapan sesuai penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dengan kategori: a. Rendah 10-15 b. Tinggi 16-34 c. Strategis 35-50	19	21	23	27	30	32	35

POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

